



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2025

TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyusunan Peraturan Bupati Bantul, perlu menyusun perencanaan penyusunan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota, perencanaan penyusunan Peraturan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam hal terdapat perintah perundang-undangan atau keadaan mendesak untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembentukan Peraturan Bupati di luar Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 13 Januari 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2025
TENTANG
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TAHUN 2025

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI BANTUL TAHUN 2025

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah	a. Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa c. Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD	Triwulan I	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
2	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung: a. Kebijakan kelengkapan administrasi yang belum tertuang dalam Perda; dan b. Sinkronisasi dengan peraturan pada Perangkat Daerah lain	Triwulan I	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Tarif Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projomansari	a. Penggolongan Pelanggan b. Tarif Pelayanan Air Minum c. Prosedur Berlangganan	Triwulan I	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
4	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Madukismo	a. Program Bangunan dan Lingkungan b. Rencana umum dan panduan rancangan c. Rencana investasi d. Pengendalian rencana f. Pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan	Triwulan I	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
5	Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok	a. Kawasan-kawasan larangan merokok b. Satgas KTR c. Pelaksanaan sanksi	Triwulan I	Bagian Kesejahteraan Rakyat
6	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan b. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan c. Pendanaan	Triwulan I	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perparkiran	a. pola Parkir pada Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan b. tata cara pelaksanaan sanksi administratif c. tata cara penambahan pembantu Juru Parkir d. tata cara permohonan izin e. tata cara tindakan penertiban dan pengenaan denda administratif f. mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan	Triwulan I	Dinas Perhubungan
8	Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi Tahun 2025-2027	a. Program dan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2025-2027 b. Peran stakeholder dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang terwadai dalam tim c. Target dan output pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Triwulan I	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
9	Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati	Penatausahaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Triwulan I	Bagian Perencanaan Keuangan
10	Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Produksi Usaha Daerah	a. Kenaikan harga benih padi b. Penambahan objek retribusi di UPTD Balai Benih Pertanian	Triwulan I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Perubahan Perizinan di Bidang Pelayanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	Penyesuaian kebijakan Pemerintah Daerah terkait standar pelayanan jasa medik veteriner	Triwulan I	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12	Pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sebagai acuan dalam penilaian evaluasi kinerja perangkat daerah	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
13	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah	Perubahan terhadap beberapa Pasal	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
14	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata, dan Praktik Kerja Lapangan	Sebagai pedoman pelaksanaan KKN di Kabupaten Bantul	Triwulan I	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2025-2029	a. definisi-definisi; b. potensi bencana; c. penyusun; d. sistematika; dan e. mekanisme evaluasi.	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029	a. definisi-definisi; b. tujuan penyusunan; c. bahan untuk menyusun; d. masa berlaku; e. penyusun dan pelaksana; f. sistematika; g. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang; dan h. pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17	Rencana Kontingensi Bencana Tanah Longsor	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
18	Manajemen Kedaruratan Bencana	a. manajemen kedaruratan bencana untuk tahap siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan; b. kemudahan akses pendanaan, sumber daya, serta data dan informasi saat situasi darurat; c. mekanisme dan tata cara kerja Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; dan d. tindakan yang dilakukan saat keadaan darurat.	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
19	Mekanisme Pemilihan dan Kriteria Anggota Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	a. Pelaksanaan pemilihan b. masa dan tata cara kerja c. pelaporan proses pemilihan dan pelaporan hasil kerja unsur pengarah; dan d. pendanaan	Triwulan I	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Penyesuaian dengan perolehan suara pemilu tahun 2024	Triwulan I	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	a. Batasan Verifikator yang dilakukan oleh Carik; b. Pembentukan Tim PBJ dan TPK; c. Ketugasan TPK d. Penambahan Lampiran pada Kelengkapan SPJ;	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
22	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan	a. Ketugasan Tim PBJ; b. Batas Bawah untuk pembelian langsung; c. Proses serah terima pekerjaan; d. Ketugasan Verifikator dalam dokumen PBJ;	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
23	Alokasi Dana Desa	a. Pembagian besaran ADD masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan ADD; c. Cara Penghitungan ADD; d. Mekanisme Pencairan ADD;	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
24	Dana Desa	a. Pembagian besaran Dana Desa masing-masing Kalurahan; b. Penggunaan Dana Desa; c. Mekanisme Pencairan dan pelaporan Dana Desa	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
25	Bantuan Keuangan Khusus	Menyesuaikan peruntukan HOK untuk BPJS Ketenagakerjaan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
26	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	menyesuaikan peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
27	Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan	menyesuaikan peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan serta oenyesuaian ruang lingkup	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
28	Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat	Materi, sebagian besar sama dg PERBUP sebelumnya, , merubah peruntukan HOK untuk BPJS ketenagakerjaan dan merubah peruntukan pergeseran pasukan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
29	Dana Insentif Kalurahan	Menyesuaikan dengan regulasi SAKIP Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
30	Pedoman Standar Pelayanan Publik Kalurahan	Mengakomodir mengenai perumusan, penetapan, internalisasi, penerapan dan sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik Pemerintahan Kalurahan	Triwulan I	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
31	Rencana Aksi Daerah Penghapusan Merkuri	a. target b. strategi c. kegiatan	Triwulan I	Dinas Lingkungan Hidup
32	Pedoman Pengelolaan Aduan Masyarakat	Tata cara layanan pengaduan dan Pelaporan di Kabupaten Bantul	Triwulan I	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
33	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul	mengakomodir perubahan terkait dengan materi manajemen akses	Triwulan I	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Penyelenggaraan Program Boga Sehat	a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana atau pengampu program Boga Sehat telah berubah nomenklaturnya; b. Dasar hukum yang termuat sebagian telah dicabut atau mengalami perubahan; c. Penggantian sasaran penerima manfaat; d. Penambahan detail pada mekanisme pelaksanaan, mekanisme pendataan, serta mekanisme penggantian dan/atau pemberhentian penerima manfaat; dan e. Penambahan peraturan terkait kualitas menu makanan Boga Sehat.	Triwulan I	Dinas Sosial
35	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pedoman pelaksanaan PPDB	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
36	Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah	Pedoman pengelolaan BOSDA	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
37	Pedoman Pemberian Insentif Kepada Guru Tidak Tetap, Guru Tetap Yayasan, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Tetap Yayasan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025	a. Maksud dan tujuan pemberian insentif b. Kriteria penerima insentif c. Pengajuan, pembayaran dan pertanggungjawaban d. Pengembalian insentif e. Pembinaan dan pengawasan insentif	Triwulan I	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
38	Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul	a. Pengusulan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; b. Persyaratan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; c. Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; d. Tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; e. Pembayaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi; f. Pertanggungjawaban atas Pemberian Kompensasi.	Triwulan I	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
39	Rencana Kontinjensi Kesiapsiagaan dan Ketahanan Terhadap Wabah Penyakit Infeksi Emerging Patogen Respiratory Kabupaten Bantul	Sistem dan Kapasitas untuk Kewaspadaan dan Respon : Koordinasi Kedaruratan, Surveilans Kolaboratif, Perlindungan masyarakat, Respon Medis /Manajemen klinis	Triwulan I	Dinas Kesehatan
40	Percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Bantul	sistem penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi untuk ibu hamil dan produk kehamilan, meningkatkan mutu pelayanan serta melindungi pasien dari kelalaian dalam profesionalitas tenaga kesehatan	Triwulan I	Dinas Kesehatan
41	Tarif Retribusi Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bantul	Tarif Retribusi pelayanan Laboratorium medik dan laboratorium kesmas berdasarkan perkembangan pelayanan labkesda yang baru dan penyesuaian dengan harga reagen dan BMHP	Triwulan I	Dinas Kesehatan
42	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Pemerintah Kabupaten Bantul	Perubahan pada Lampirannya berkaitan dengan perubahan atas pedoman penilaian dan kriteria verifikasi berkas usulan peserta oleh Sekretariat KPP dan perubahan atas kategori kejuaraan	Triwulan I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
43	Tata Cara Penugasan dan Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas	Perubahan persyaratan pengangkatan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas	Triwulan I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
44	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha b. tata cara pengenaan sanksi administratif c. pengelolaan pengaduan masyarakat d. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS	Triwulan I	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
45	Kode Etik Pelayanan Petugas gerai pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bantul	a. norma dasar b. budaya kerja c. etika pelayanan d. standar perilaku e. hak dan kewajiban petugas gerai penyelenggaraan pelayanan f. larangan, penghargaan dan sanksi.	Triwulan I	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
46	Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah	a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Non ASN b. Prosedur Pengadaan Pegawai Non ASN c. Penilaian Kinerja Pegawai Non ASN d. Penghasilan Pegawai Non ASN e. Pengembangan Kompetensi Pegawai Non ASN f. Pemberian Penghargaan dan Hukuman Bagi Pegawai Non ASN g. Pemberian Cuti Bagi Pegawai Non ASN h. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja i. Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non ASN	Triwulan II	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
47	Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	a. Struktur Anggaran BLUD b. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran d. Pelaksanaan Anggaran BLUD e. Pengelolaan Kas, Belanja, Persediaan dan Aset f. Pengelolaan Utang dan Piutang BLUD g. Pengelolaan Investasi BLUD h. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran i. Surplus dan Defisit BLUD j. Penyelesaian Kerugian k. Akuntansi dan Pelaporan	Triwulan II	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
48	Perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusutan Arsip	a. Pemindahan Arsip b. Pemusnahan Arsip c. Penyerahan Arsip Statis	Triwulan II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
49	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Triwulan II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
50	Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029	a. Rencana aksi program serta kegiatan di bidang kepemudaan b. Koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan c. Pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	Triwulan II	Bagian Kesejahteraan Rakyat
51	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi	a. Pendataan koperasi b. Tata cara pengajuan permohonan program Pemberdayaan Koperasi c. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan pelanggaran d. Petunjuk pelaksanaan pengawasan koperasi	Triwulan II	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
52	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	a. penambahan satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak b. penyesuaian tugas dan fungsi satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak	Triwulan II	Bagian Organisasi
53	Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul	a. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan b. Prosedur pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan c. Pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting d. persyaratan dan mekanisme pelaporan e. sistem informasi pendukung layanan administrasi kependudukan	Triwulan II	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
54	Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. hubungan RPKB terhadap dokumen perencanaan lainnya, termasuk rencana kontingensi; f. masa berlaku; g. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan h. pendanaan.	Triwulan II	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
55	Bagi Hasil Retribusi Daerah	a. Pembagian besaran BHR masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan BHR; c. Cara Penghitungan BHR; d. Mekanisme Pencairan BHR;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
56	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	a. Perubahan maksimal pada nominal rupiah; b. Pengaturan dasar golongan II.a pada masa kerja golongan;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
57	Dana Kompensasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk fasilitas Pemerintah Daerah	a. Pembagian Besaran masing-masing Kalurahan; b. Cara Penghitungan dana kompensasi; c. Mekanisme pencairan dana kompensasi	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
58	Bagi Hasil Pajak Daerah	a. Pembagian besaran BHP masing- masing kalurahan; b. Peruntukan penggunaan BHP; c. Cara Penghitungan BHP; d. Mekanisme Pencairan BHR;	Triwulan II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
59	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	a. Akses informasi dan dokumentasi publik b. Hak dan kewajiban c. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi d. Kelembagaan pejabat pengelola inpormasi dan dokumentasi e. Kelengkapan pengelola layanan informasi dan dokumentasi f. Klasifikasi informasi publik g. Mekanisme permohonan informasi dan dokumentasi h. Pembinaan dan pengendalian penataan layanan informasi dan dokumentasi i. Keberatan dan fasilitasi sengketa informasi	Triwulan II	Dinas Komunikasi dan Informatika
60	Pengelolaan Aplikasi di Bidang Pendidikan	Pedoman pemanfaatan aplikasi di Dinas Dikpora	Triwulan II	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
61	Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	a. Pengaturan Internal Korporasi (<i>Corporate By laws</i>) b. Pengaturan Internal Staf Medis (<i>Medical Staff By laws</i>) c. Pengaturan Internal Staf Keperawatan (<i>Nursing staf by law</i>)	Triwulan II	RSUD Panembahan Senopati
62	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 154 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul	Perubahan pada Lampirannya berkaitan dengan identifikasi, penilaian, dan pemetaan talenta dilaksanakan melalui metode pengujian, pengukuran, dan/atau pemeringkatan	Triwulan II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
63	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain	a. Kerja Sama b. Mitra Kerja Sama c. Tahapan Kerja Sama d. Berakhirnya Kerja Sama	Triwulan III	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam
64	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Statis	Pengelolaan Arsip Statis	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
65	Pengelolaan Arsip Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Pengelolaan Arsip Dinamis	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
66	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Triwulan III	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
67	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan	Pengaturan garis sempadan	Triwulan III	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
68	Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Goa Selarong	a. Program Bangunan dan Lingkungan b. Rencana umum dan panduan rancangan c. Rencana investasi d. Pengendalian rencana e. Pedoman pengendalian pelaksanaan pengelolaan	Triwulan III	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
69	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Pembentukan aturan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren	Triwulan III	Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
70	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak	a. Ruang bermain ramah anak b. Sekolah ramah anak c. Tempat ibadah ramah anak	Triwulan III	Bagian Kesejahteraan Rakyat
71	Grand Design Hilirisasi Ekonomi Melalui Koperasi	a. Petunjuk pelaksanaan hilirisasi ekonomi melalui koperasi b. Pembagian peran stakeholder untuk mencapai hilirisasi ekonomi melalui koperasi	Triwulan III	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
72	Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Potong Hewan	a. Perubahan kenaikan tarif retribusi pemotongan hewan dari Rp30.000,00 menjadi Rp40.000,00 b. Penambahan tarif retribusi layanan pemeriksaan daging sebesar Rp3.000,00 per kilogram	Triwulan III	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
73	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 b. pedoman penyusunan dokumen dan kebijakan tahun 2026 c. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
74	Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026	a. Perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2026 b. Tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
75	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	a. Perubahan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 b. pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
76	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025	a. Perubahan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025 b. Tindak lanjut penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
77	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	a. Pembentukan Forum CSR b. Alur pengajuan CSR c. Pelaporan CSR d. Ketentuan terkait dengan pelaksanaan CSR	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
78	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
79	Pengelolaan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta di Kabupaten Bantul	Sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan warisan dunia sumbu filosofi di Kabupaten Bantul	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
80	Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2035	a. tujuan dan sasaran GDPK b. Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Daerah	Triwulan III	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
81	Rencana Kontingensi Banjir	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
82	Rencana Kontingensi Tsunami	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
83	Rencana Kontingensi Cuaca Ekstrem	a. definisi-definisi; b. maksud dan tujuan penyusunan; c. penyusun dan pelaksana; d. sistematika; e. posisi rencana kontingensi terhadap dokumen perencanaan lainnya; f. aktivasi rencana kontingensi; g. mekanisme pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana; h. uji rencana kontingensi; i. masa berlaku; j. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengkajian ulang; dan k. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
84	Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	a. definisi-definisi; b. tujuan penyusunan; c. masa berlaku; d. penyusun dan pelaksana; e. sistematika; f. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan peninjauan ulang; dan g. pendanaan.	Triwulan III	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
85	Batas Kalurahan Guwosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
86	Batas Kalurahan Sendangsari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
87	Batas Kalurahan Triwidadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
88	Batas Kalurahan Argodadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
89	Batas Kalurahan Argosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
90	Batas Kalurahan Argorejo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
91	Batas Kalurahan Argomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
92	Batas Kalurahan Bangunjiwo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
93	Batas Kalurahan Tamantirto	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
94	Batas Kalurahan Tirtonirmolo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
95	Batas Kalurahan Ngestiharjo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan III	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
96	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a. Perlu menambahkan tentang percepatan transformasi digital b. Perlu menambahkan pasal teknis tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, dan pusat data c. perlu menambahkan pasal yang mengatur lebih teknis tentang audit SPBE sesuai dengan Peraturan BSSN dan Peraturan BRIN d. perlu menambahkan pasal yang mengatur dengan lebih lengkap terkait arsitektur dan peta rencana SPBE	Triwulan III	Dinas Komunikasi dan Informatika
97	Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	a. Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau b. Kriteria Penerima BLT DBH-CHT c. Mekanisme Penyaluran BLT DBH-CHT	Triwulan III	Dinas Sosial
98	Pendirian Unit Layanan Disabilitas	Materi tentang pendirian ULD dan pengelolaan ULD	Triwulan III	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
99	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah, Anak Tidak Sekolah dan Pemberantasan Buta Aksara	Petunjuk pelaksanaan Perda No 8 Tahun 2024 terutama terkait tata cara pemberian bantuan pembiayaan dan tata cara pemberian penghargaan	Triwulan III	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
100	Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Umum Layanan Kesehatan Pada Rsud Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	Tarif Layanan Kesehatan	Triwulan III	RSUD Panembahan Senopati
101	Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pedoman mengenai sikap, tingkah laku dan perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan Pegawai, bangsa, dan negara. (yang termasuk di dalam wilayah kode Etik dan Kode Perilaku dalam peristiwa yang dinilai baik/buruk terhadap core value ASN BerAKHLAK)	Triwulan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
102	Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul	Pedoman dalam proses mutasi atau perpindahan tugas dan/atau lokasi antar OPD dalam Pemerintah Kabupaten Bantul, mutasi atau perpindahan tugas dan/atau lokasi dari instansi pusat atau instansi daerah lain ke Pemerintah Kabupaten Bantul atau perpindahan tugas dan/atau lokasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke instansi pusat atau instansi daerah lain.	Triwulan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
103	Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul	Pedoman dalam proses pengadaan ASN baik melalui seleksi CPNS maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul	Triwulan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
104	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bantul	Kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK Kabupaten dan Kapanewon	Triwulan III	Dinas Sosial

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
105	Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	a. tindak lanjut penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Triwulan IV	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
106	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tahun 2025-2045	a. Tujuan penataan wilayah perencanaan b. Rencana struktur ruang c. Rencana pola ruang d. ketentuan pemanfaatan ruang e. Peraturan zonasi Kelembagaan	Triwulan IV	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
107	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat	a. Batasan Kawasan pengaruh pasar rakyat b. Pendirian, pembangunan kembali, pemindahan dan penggabungan pasar rakyat c. Tipe kelas pasar d. Partisipasi masyarakat	Triwulan IV	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
108	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Pengaturan jenis dan penyusunan naskah dinas b. Penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas c. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar d. Pengurusan naskah dinas korespondensi	Triwulan IV	Bagian Organisasi
109	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Indikator Kinerja Utama b. Rencana Strategis c. Rencana Kinerja Tahunan d. Perjanjian Kinerja Tahunan e. Laporan Kerja Instansi Pemerintah	Triwulan IV	Bagian Organisasi
110	Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan dari PNS dan PPPK b. Jam kerja orang yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu	Triwulan IV	Bagian Organisasi

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
111	Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul	a. Prinsip pemberian TPP b. Tujuan pemberian TPP c. Kriteria pemberian TPP d. Penghitungan besaran pemberian TPP e. Sasaran pemberian TPP f. Indikator pemberian TPP g. Pelaksanaan pemberian TPP h. Pendanaan i. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Bagian Organisasi
112	Batas Kalurahan Seloharjo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
113	Batas Kalurahan Panjangrejo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
114	Batas Kalurahan Srihardono	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
115	Batas Kalurahan Sidomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
116	Batas Kalurahan Sumbermulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
117	Batas Kalurahan Mulyodadi	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
118	Batas Kalurahan Parangtritis	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
119	Batas Kalurahan Donotirto	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
120	Batas Kalurahan Tirtomulyo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
121	Batas Kalurahan Tirtohargo	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
122	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul	Mekanisme pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan stimulant rumah swadaya	Triwulan IV	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
123	Batas Kalurahan Tirtosari	a. Titik koordinat batas kalurahan; b. Batas kalurahan sesuai arah mata angin; c. Kode Desa; d. Jaminan terhadap hak atas tanah; e. Nama-nama dusun; f. Ketentuan peralihan	Triwulan IV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
124	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten	Penetapan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul	Triwulan IV	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
125	Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2026	Pedoman standardisasi harga barang dan jasa dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi Perangkat Daerah yang memuat, antara lain: a. Komponen standar biaya umum; b. komponen standar satuan harga; c. komponen satuan pokok kegiatan; dan d. komponen analisa standar biaya untuk konstruksi dan non konstruksi		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
126	Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026	Pedoman untuk memberikan tunjangan perumahan kepada pimpinan dan anggota DPRD		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
127	Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026	pedoman untuk memberikan tunjangan transportasi kepada anggota DPRD		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
128	Perubahan Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025	Mengakomodir perubahan harga komponen yang ada dalam SHBJ		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
129	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan	Menambahkan mekanisme pengajuan permintaan barang persediaan		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
130	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
131	Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Penjabaran rencana keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan daerah periode tahun anggaran 2025		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	JUDUL PERATURAN BUPATI	PERKIRAAN MATERI YANG AKAN DIATUR	TARGET PENYAMPAIAN	PERANGKAT DAERAH PENGUSUL
1	2	3	4	5
132	Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	mengakomodir pengaturan mengenai Opsen Pajak		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH